

**IMPLIKASI KEBIJAKAN *MADE IN CHINA* 2025 TERHADAP HUBUNGAN
EKONOMI INDONESIA-CHINA**



WILDAN IRWANSAH ASWA

E061171524

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLIKASI KEBIJAKAN MADE IN CHINA 2025 TERHADAP HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA-CHINA

N A M A : WILDAN IRWANSAH ASWA

N I M : E061171524

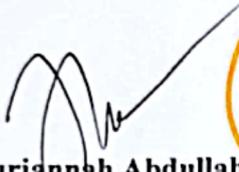
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 16 Agustus 2024

Menyetujui:

Dosen Pembimbing,


Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

NIP. 198901032019032010

Mengetahui :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si

NIP. 197508182008011008



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : IMPLIKASI KEBIJAKAN MADE IN CHINA 2025 TERHADAP HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA-CHINA

NAMA : WILDAN IRWANSAH ASWA

NIM : E061171524

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 2 Agustus 2024.



Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Anggota : 1. Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

2. Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Irwansah Aswa

NIM : E061171524

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

“Implikasi Kebijakan Made in China 2025 Terhadap Hubungan Ekonomi Indonesia-China”

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Demikian pertanyaan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Makassar, 19 Agustus 2024


an Irwansah Aswa

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, Petunjuk, Berkah serta Ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi penulis serta skripsi ini. Tak lupa pula, penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan kita arahan serta petunjuk mengenai tuntunan kepada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi ada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak dapat dipungkiri apabila terdapat beberapa kesalahan dalam penyusunannya sehingga dengan segala kerendahan hati, penulis harapkan agar kesalahan yang ada dapat menjadi masukan bagi penulis kedepannya. Mengingat setiap manusia memiliki keterbatasannya masing-masing maka hal yang perlu untuk dilakukan adalah agar masing-masing dari kita dapat saling menasehati dan mengingatkan agar kebaikankebaikan dapat menjumpai kita kedepannya, Aamiin. Selain dari itu, penulis haturkan banyak terima kasih kepada segenap elemen yang telah berpartisipasi, mengingatkan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Terima kasih kepada ayah dan ibu penulis **H. Abdul Wahab Syam** dan **Hj. Siti Aspa** yang telah memberikan support, dukungan, saran serta doa dan ridhanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi penulis

selama ini dan dalam penyusunan skripsi ini, semoga kalian berdua selalu berada dalam Rahmat, Hidayah dan Lindungan-Nya. Begitupun degan saudara-saudara penulis, **Wiwin dan Winda** semoga kalian selalu dimudahkan segala urusannya, Aamiin.

2. Terima kasih kepada seluruh keluarga penulis, **Bernadus Go, Michael Go Sammy Tarekar, Yulita Retanubun**, yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi dan studi yang dilalui oleh penulis, beserta keluarga yang penulis tidak dapat menyebutkannya satu persatu yang selalu mengingatkan penulis dalam penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki dan keberkahan hidup, Aamiin.
3. Rektor Universitas Hasanuddin pada saat penulis memasuki kehidupan perkuliahan di tahun 2020, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** dan **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya pada saat penulis lulus pada program studi ini di tahun 2024.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada saat penulis memasuki duniaperkuliahan, **Prof. Dr. Armin, M. Si** dan **Prof. Dr. Phil Sukri, M. Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh jajarannya pada saat penulis telah menyelesaikan pendidikan sarjana.
5. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, **Prof. H. Darwis, MA. Ph. D**, merupakan sosok yang bijaksana dan rasional.

Penulis berterima kasih atas ilmu yang diajarkan selama studi, sifat teladan rendah hatinya menjadi panutan, dan dukungannya selama berkuliah di Departemen Hubungan Internasional.

6. Dosen Pembimbing I, **Nurjannah Abdullah, S. IP, MA**, yang telah membantu penulis dalam menyusun penelitian ini hingga berhasil menyelesaikan dengan hasil yang baik. Penulis sangat bersyukur menjadi anak bimbingan karena sangat dipermudah baik dalam hal penyusunan maupun proses pemberkasan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kak Jannah yang merupakan dosen andalan dalam pemilihan kelas tiap semesternya, yang memberikan banyak nasehat dan masukan dalam menjalani hari-hari sebagai mahasiswa Hubungan Internasional dari semester awal hingga semester akhir.
7. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada seluruh pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Unhas atas ilmu yang diajarkan, lingkungan belajar yang sangat nyaman ruang bertumbuh yang sangat baik: **Drs. Patrice Lumumba, MA., Drs. Aspiannor Masrie, M. Si. (alm), Drs. Munjin Syafik Asy'Ari, Atika Puspita Marzaman, S. IP, MA., Drs. H. Husan Abdullah, M. Si., M. Imran Hanafi, MA, M. Ec., Ishaq Rahman, S. IP., M.Si., Nur Isdah, S. IP., MA, Seniwati S. Sos, M. Hum, Ph. D., Pusparida Syahdan, S. Sos, M. Si., Burhanuddin, S. IP, M. Si., Muhammad Nasir Badu, Ph. D, Dr. H. Adi Suryadi B. MA., Bama Andika Putra, S. IP., M. IR.,**

Abdul Razaq Z. Cangara., S. IP., M. IR., Biondi Sanda Sima, S. IP., M. Sc., L. LM., dan Mashita Dewi Tidore, S. IP., MA.

8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staf Departemen HI, FISIP, Unhas, **Ibu Rahmah, Pak Ridho, Pak Dayat, Kak Ita, dan Kak Salni** yang telah membantu proses administrasi dan kebutuhan penulis selama penyelesaian tugas akhir ini.
9. Teman-Teman **LIBERTE** yang telah menemani penulis dari mahasiswa baru hingga berada pada fase semester akhir ini. Sukses terus dan terima kasih telah menjadi teman yang baik dalam keluarga besar Hubungan Internasional angkatan 2017.
10. Terima kasih kepada **HIMAHI FISIP UNHAS**, tempat penulis mendapatkan banyak pengalaman dan nilai-nilai yang begitu berharga, tempat dimana penulis dapat belajar bagaimana melihat realitas yang sesungguhnya, tempat dimana suka dan duka dapat berjalan beriringan, beserta orang-orang yang pernah ada didalamnya.
11. Terima kasih kepada **UKM SENI TARI UNHAS**, tempat penulis mendapatkan banyak pengalaman dan nilai-nilai yang begitu berharga, dimana penulis dikenalkan berbagai keanekaragaman budaya Nusantara
12. Terakhir terima kasih pada diri sendiri, **Wildan Irwansah Aswa S.IP** yang telah bersemangat menyelesaikan pendidikan dalam jenjang S1 Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Unhas.

ABSTRACT

This study aims to find out what the implications of the Made in China 2025 policy have on the economic relations between Indonesia and China, as well as Indonesia's strategy to deal with the Made in China 2025 policy. The method in this study is descriptive research with literature study analysis. The results of this study show that the implications of the Made in China 2025 policy on the economic relationship between Indonesia and China are that Chinese products in the Indonesian market tend to be high. Indirectly, China has become the deepest contributor to the deficit in Indonesia's trade balance and causes Indonesia's imports from China to be relatively high. Indonesia's strategy to face the Made in China 2025 policy is to form a task force involving Kadin and the association to eradicate illegal imports which aims to bring order to illegal imported goods in the community and reduce the number of Chinese products in the Indonesian market as a result of the Made in China 2025 policy.

Keywords: Made in China, Import, Indonesia, China, Products

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi kebijakan *Made in China 2025* terhadap hubungan ekonomi Indonesia dan China, serta strategi Indonesia menghadapi kebijakan *Made in China 2025*. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan *Made in China 2025* terhadap hubungan ekonomi Indonesia dan China adalah produk China di pasar Indonesia cenderung tinggi. Secara tidak langsung, China telah menjadi negara penyumbang defisit terdalam dalam neraca perdagangan Indonesia dan menyebabkan impor Indonesia dari China terbilang tinggi. Adapun strategi Indonesia menghadapi kebijakan *Made in China 2025* adalah dengan membentuk satgas yang melibatkan Kadin maupun asosiasi pemberantasan impor ilegal yang bertujuan dalam menertibkan barang impor ilegal di masyarakat dan mengurangi jumlah produk China di pasar Indonesia sebagai dampak dari kebijakan *Made in China 2025*.

Kata Kunci: Made in China, Impor, Indonesia, China, Produk

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Konsep Kebijakan Ekonomi Politik	18
C. Konsep Kerjasama Bilateral.....	28
D. Konsep Perdagangan Bebas	31
BAB III GAMBARAN UMUM	33
A. Kebijakan <i>Made in China 2025</i>	33
B. Hubungan Bilateral Indonesia-China.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Implikasi Kebijakan <i>Made in China 2025</i> terhadap Hubungan Ekonomi Indonesia dan China	67
B. Strategi Indonesia menghadapi Kebijakan <i>Made in China 2025</i>	80
BAB V PENUTUP	86

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia Internasional saat ini tidak hanya disibukkan dengan masalah-masalah militer dan kebudayaan melainkan juga berbagai permasalahan lain seperti ekonomi, perdagangan, dan masalah pangan. Salah satu kebijakan yang berkontribusi pada dinamika hubungan internasional adalah kebijakan *Made In China 2025* yang diumumkan oleh Perdana Menteri Li Keqiang pada tahun 2015. Kebijakan *Made in China 2025* merupakan sebuah inisiatif untuk meningkatkan industri China secara komprehensif, yang terinspirasi dari rencana Industri 4.0 Jerman yang telah diadopsi sejak 2013 dengan inti gagasan yaitu penerpaan alat-alat teknologi informasi pada produksi (CSIS 2015). Oleh karena itu, kebijakan ini dapat juga disebut sebagai replikasi dari rencana industri Jerman yang telah berlangsung sejak 2013 yang kemudian diadaptasikan kedalam kebijakan luar negeri China berkaitan dengan pengembangan industri teknologi.

Made in China 2025 direalisasikan sebagai bagian dari strategi China di bidang ekonomi dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dimana strategi ekonomi seringkali diasosiasikan dengan pemanfaatan keanekaragaman sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut dalam rangka pencapaian pertumbuhan dan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi negara tersebut menjadi lebih baik (Widyanto 2019). Tujuan dari kebijakan tersebut untuk mengubah China

dari negara yang berfokus pada produksi rendah menjadi negara yang berfokus pada produksi berbasis teknologi tinggi (Wepo 2023).

Oleh karena itu, kebijakan tersebut tentu saja berpotensi meningkatkan kapabilitas dan kapasitas industri China, baik domestik maupun luar negeri, terlebih industri komponen inti dan material telah meningkat dari 40% menjadi 70% sejak 2020 hingga 2025. Dalam hal ini, pemerintah China berharap 2025 akan menjadi tahun dimana produktivitas sektor manufaktur telah meningkat melalui serangkaian inovasi, penciptaan perusahaan yang multinasional yang mampu berkompetisi dengan hemat sumber daya dan ramah lingkungan (Franedya 2018).

Pada 2023, China selama 14 tahun berturut-turut telah memiliki industri manufaktur terbesar di dunia di berbagai sektor seperti otomotif dan pembuatan kapal, dengan berbagai pencapaian seperti munculnya kendaraan energi baru (NEV) dan pengoperasian pesawat penumpang komersial terbesar pertama yang diproduksi dalam negeri China serta hadirnya uji coba pelayaran kapal pesiar buatan dalam negeri yang pertama kalinya (Times 2024). Bagi China, hal ini tentu saja membantu negaranya menjadi tidak terlalu rentan ketika berhadapan dan lebih mampu dalam bersaing dengan negara maju. Dengan kondisi tersebut, produk manufaktur China akan memiliki persaingan yang lebih ketat dengan negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Bahkan, output dari perusahaan-perusahaan industri besar telah meningkat

sebesar 1 poin persentase sejak 2022 dengan tumbuh sebesar 4,6% dari tahun ke tahun pada 2023 (Times 2024).

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, dilaporkan bahwa selama hampir 10 tahun terakhir, China memiliki pengaruh yang meningkat secara signifikan di kawasan Asia, termasuk Indonesia, dimana hal ini telah melampaui pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Penilaian tersebut mengacu pada sejumlah faktor penilaian seperti keadaan ekonomi, kinerja pemerintah, keberpihakan dalam politik dan faktor demografi (Indonesia 2020). Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi pengaruh dan hegemoni Amerika di kawasan tersebut sehingga Amerika perlu mengantisipasi pengaruh China di kawasan Asia Tenggara.

Di Asia Tenggara, tercatat nilai perdagangan China dengan negara ASEAN selama periode Januari hingga Oktober 2018 adalah 3,18 trilyun Renminbi, setara dengan Rp. 6.709 trilyun. Angka tersebut menunjukkan surplus sebesar 13,7% pada periode yang sama pada 2017. Adapun total surplus perdagangan China dalam periode Oktober sebesar 233,63 milyar Renminbi, lebih besar dibandingkan bulan September yang memiliki jumlah sebesar 213,23 milyar Renminbi (Indonesia 2020). Kawasan Asia Tenggara sendiri memiliki potensi yang besar dimana kawasan tersebut berjumlah penduduk sebanyak lebih dari 600 juta jiwa, memiliki beragam sumber daya alam dan letak geografi yang strategis sehingga menjadikannya sebagai salah satu kawasan yang tetap stabil, memiliki pertumbuhan yang positif dan berkembang (Hardianto 2023). Oleh

karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa China berusaha untuk memperbesar pengaruhnya di kawasan tersebut. Terkhusus pada Indonesia yang memiliki banyak potensi didalamnya.

Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi yang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat keseriusan dari Indonesia untuk mengembangkan kapabilitas dirinya melalui keseriusan pemerintah untuk mengekang ketergantungannya pada ekspor komoditas mentah, serta meningkatkan peran industri manufaktur dalam pengembangan perekonomian (Investments n.d.). Pada tahun 2022, PDB Indonesia perkapita mampu tumbuh sebesar USD4,783 dengan tingkat inflasi di angka 4%, rasio utang luar negeri terhadap PDB sebesar 30,1% pada triwulan I tahun 2023 (Limanseto 2023b). Potensi tersebut tentu saja dapat dimanfaatkan bagi pertumbuhan ekonomi agar dapat menjadi lebih baik di masa depan, terlebih terdapat kebijakan MIC 2025 yang bisa saja memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi perekonomian Indonesia.

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa langkah-langkah yang diambil dengan adanya kebijakan tersebut guna melihat apakah kebijakan tersebut berdampak positif atau negatif terhadap Indonesia. Seperti kita ketahui, media digital, khususnya untuk kegiatan perekonomian, memberikan fitur tanpa batas (*borderless*) dengan hambatan perdagangan yang sangat minim. Hal ini tentu saja akan mempercepat konektivitas transnasional. Dalam kajian hubungan internasional, hubungan transnasional tentunya mencakup koherensi yang

komprehensif dan kompleks. Dalam hal kebijakan “*Made in China 2025*”, Indonesia tidak bisa hanya melihat hal ini sebagai kerja sama ekonomi biasa karena platform digital menjadi dominan di pasar negara berkembang, melainkan juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia dalam kerjasama ataupun hubungan ekonominya terhadap China. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih lanjut melalui penelitian ini mengenai “Implikasi Kebijakan *Made In China 2025* terhadap Hubungan Ekonomi Indonesia China”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa batasan dalam penelitian ini mengkaji pada motif China dalam menerapkan program “*Made in China 2025*” dalam rentang tahun 2015 hingga 2024 di Indonesia dan mengetahui implikasi program tersebut bagi kedua Negara. Oleh karena itu, dengan batasan masalah tersebut maka rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implikasi kebijakan *Made in China 2025* terhadap hubungan ekonomi Indonesia dan China?
2. Bagaimana strategi Indonesia menghadapi kebijakan *Made in China 2025*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implikasi kebijakan *Made in China 2025* terhadap hubungan ekonomi Indonesia dan China.
- b. Untuk mengetahui strategi Indonesia menghadapi kebijakan *Made in China 2025*.

2. Manfaat penelitian

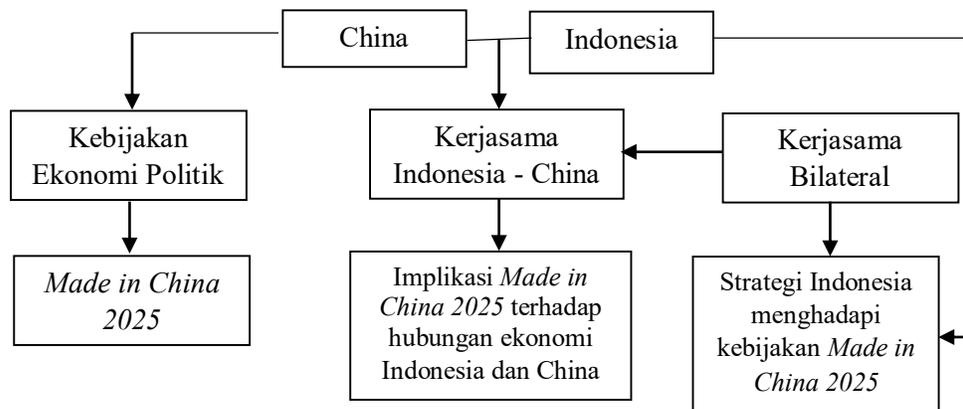
Adapun manfaat yang ingin penulis dapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi berupa informasi yang bermanfaat bagi akademisi, pemerhati, dan praktisi yang mengkaji dan memiliki konsentrasi kajian pada isu yang berkaitan dengan kebijakan China, terkhusus pada program *Made in China 2025*.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan informasi dan sebagai referensi tambahan yang berkaitan dengan implikasi program *Made in China 2025* terhadap hubungan ekonomi Indonesia dan China.

D. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua konsep yaitu konsep kebijakan ekonomi politik dan konsep kerjasama bilateral untuk membantu dalam menjalankan penelitian ini. Berikut adalah kerangka pikir dari penelitian ini.

Bagan 1.1 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber (Penulis, 2024)

1. Kebijakan Ekonomi Politik

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang disulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agustino 2008; Aslinda 2023). Ekonomi politik adalah sebuah studi yang merupakan penggabungan dari ilmu ekonomi dan politik. Kedua disiplin ilmu tersebut merupakan bagian dari ilmu sosial yang berbasiskan dua sub-disiplin ilmu yaitu ekonomi dan politik yang dikaitkan dengan bagaimana mengordinasi dan mengorganisasikan suatu kegiatan di masyarakat, pengelolaan konflik, pengalokasian keuntungan dan beban, serta penyediaan kebutuhan dan keinginan masyarakat (Nenden Herawaty Suleman 2021).

Pemaknaan pada analisis ekonomi politik dipahami sebagai upaya dalam memahami dimensi politik dari konteks yang lebih kompleks dan

menginformasikan kebijakan dan program yang terjadi kepada semua lapisan masyarakat (Australian Government 2016). Whaites menjelaskan bahwa analisis ekonomi politik merupakan model analisis terhadap kebijakan di bidang ekonomi atau program pembangunan yang sangat teknis dan berbasis input yang dalam prosesnya cenderung kurang berjalan sesuai dengan program dan rencana kebijakan (Whaites 2017). Singkatnya, Whaites menekankan pada proses keberhasilan di bidang ekonomi dalam praktik analisis ekonomi politik.

Selain itu, analisis ekonomi politik merupakan pilihan atas analisis kebijakan yang responsif secara politik, yang kemudian dapat difokuskan pada dua aspek, yaitu (Verena Fritz 2014)

1. Fokus pada reformasi kebijakan yang memberi nilai tambah dalam pembangunan sehingga dapat menikmati dukungan dari konstituen yang kuat secara politik.
2. Fokus pada tindakan yang dapat dilaksanakan secara langsung di dalam atau oleh pemerintah daripada mencari perubahan struktural yang besar

Kebijakan ekonomi akan berpengaruh jangka panjang kepada kedua negara atau lebih yang saling menjalin kerja sama. Setiap kebijakan yang dikeluarkan suatu negara, dapat mempengaruhi kebijakan dari negara lain sepanjang kedua negara atau lebih saling memiliki hubungan ekonomi. Adanya kebijakan *Made In China 2025* diduga dapat mempengaruhi hubungan ekonomi antara Indonesia dan China sebagaimana teori kebijakan

perdagangan internasional, yaitu setiap negara yang merumuskan sebuah kebijakan memiliki prinsip dan teori masing-masing dalam penerapan kebijakannya (Cahyono et al 2021).

Terdapat dimensi dari analisis ekonomi politik, yaitu aktor, institusi dan struktur.

1. Aktor akan bervariasi dalam menjalankan agensi yang diseimbangkan oleh hubungan kekuasaan yang dimainkan oleh peran ekonomi, sosial dan politik (Harris 2013)
2. Institusi, dipahami sebagai aturan main dalam masyarakat atau batasan yang dirancang sehingga membentuk interaksi manusia, yang mencakup aturan formal dan informal dan mengatur perilaku yang cenderung lebih rentan terhadap perubahan dalam jangka menengah daripada fitur struktural.
3. Struktural dipahami sebagai kondisi yang mempengaruhi negara dan sistem politik, termasuk karakteristik geografis, demografis, historis, ekonomi, dan sosial masyarakat yang bersangkutan (Wildan 2022)

Penelitian ini menggunakan definisi dari Whaites yang memaknai ekonomi politik sebagai model analisis terhadap kebijakan di bidang ekonomi atau program pembangunan yang sangat teknis dan berbasis input yang dalam prosesnya cenderung kurang berjalan sesuai dengan program dan rencana kebijakan. Serta menggunakan definisi dari Aslinda yang memaknai kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Alhasil, dalam penelitian ini dipahami bahwa kebijakan ekonomi politik adalah serangkaian tindakan yang mengordinasi dan mengorganisasikan suatu kegiatan di masyarakat yang diusulkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk pengelolaan konflik, pengalokasian keuntungan dan beban, serta penyediaan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Konsep ini digunakan dalam menganalisis bagaimana implikasi dari kebijakan *Made in China 2025* terhadap ekonomi Indonesia dan China serta strategi Indonesia menghadapi kebijakan *Made in China 2025*. Analisis tersebut digunakan dengan memahami bagaimana definisi yang digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu *Made in China 2025* dengan pendekatan dimensi analisis ekonomi politik yaitu aktor, institusi dan struktur.

2. Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan bagian dari kerjasama internasional. Kerja sama internasional dapat dipahami sebagai upaya kerja sama yang umumnya dilakukan oleh beberapa negara yang saling menguntungkan sehingga kedua negara tersebut harus harmonis dan bermanfaat satu sama lain (Jusmalia Oktaviani 2023). Dengan tujuan yang diharapkan dari kerjasama internasional maka terdapat beberapa bentuk dari kerjasama internasional

yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan hubungan antara dua negara atau lebih yang saling menggambarkan hubungan timbal balik yang saling terlibat yang dibangun atas dasari prinsip saling menjaga kepentingan nasional, menjaga perdamaian dan selalu berusaha meningkatkan ekonomi negara (Shellia 2017).

Kerja sama bilateral adalah hubungan antara negara-negara yang tidak dibatasi oleh geografis, dengan tujuan menciptakan perdamaian dunia melalui berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Amalia 2018). Selain itu, kerja sama bilateral juga dapat dipahami sebagai upaya kerja sama yang dilakukan oleh dua negara dan tidak terbatas pada wilayah satu negara, yang kemudian perjanjian kerja sama bilateral dinyatakan dalam sebuah *Agreement, Memorandum of Understanding*, atau *Treaty* (Jusmalia Oktaviani 2023).

Menurut Juwondo, kerja sama bilateral yang dipimpin oleh satu negara sangat penting karena merupakan interaksi antara dua negara yang dikembangkan dan ditingkatkan dengan menghormati hak kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan sebagai negara bangsa, tanpa mengabaikan atau mengisolasi negara lain, serta bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan nilai tambah yang mendukung hubungan bilateral. Kerja sama bilateral dapat meliputi berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, budaya, masyarakat, pertahanan, dan keamanan (Munatama dan Zhaidah 2023).

Konsep ini digunakan dalam mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pola kerjasama bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan China dengan menggunakan definisi dari Shellia sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis implikasi dari kebijakan *Made in China 2025* terhadap ekonomi Indonesia dan China. Analisis tersebut digunakan dengan memahami bagaimana definisi yang digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu *Made in China 2025* dengan bentuk dari kerjasama bilateral yang telah dilakukan antara Indonesia dan China.

3. Konsep Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas (*free trade*) merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah transaksi yang dilakukan oleh satu negara ke negara lainnya. Istilah mengenai perdagangan bebas (*free trade*) diperkenalkan pertama kali oleh Adam Smith dan David Ricardo, yang dengan sangat jelas mengaitkannya dengan imobilitas modal dalam model mereka dan memandang pertukaran komoditas yang padat modal atau padat karya sebagai pengganti sempurna bagi mobilitas faktor (Siddiqui 2018). Perdagangan bebas mengacu pada perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bertujuan untuk menghilangkan tarif, kuota, dan hambatan lainnya untuk meningkatkan perdagangan dengan melonggarkan pembatasan kelembagaan dan ekonomi (Africa 2022).

Konsep ini digunakan dalam mengidentifikasi bagaimana dampak yang dihasilkan dari realisasi kebijakan *Made in China 2025* di Indonesia yang kemudian hal tersebut dimanifestasikan kedalam bentuk perdagangan antara kedua negara.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Tipe ini berupaya menggambarkan bagaimana implikasi kebijakan *Made In China 2025* terhadap ekonomi Indonesia dan China, serta strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Made In China 2025*. Penulis menggunakan metode ini karena sesuai dengan kebutuhan penelitian, dimana penulis ingin menggambarkan secara keseluruhan data yang didapatkan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa telaah pustaka (*library research*) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, internet, majalah, dan surat kabar, serta penulis menelaah sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari berbagai media baik elektronik maupun non elektronik, dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan yakni analisis data kualitatif. Data yang dianalisis merupakan data yang bersumber dari fakta-fakta terkait Implikasi kebijakan *Made in China 2025* terhadap hubungan ekonomi Indonesia-China. Fakta yang ada kemudian dikaitkan dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan argument terkait topik penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Data-data yang diperoleh akan digunakan untuk menggambarkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang meringkas masalah-masalah dalam rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Membahas mengenai topik *Made in China 2025*, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis fenomena serupa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Malkin (2018) dengan judul penelitian “*Made in China 2025 as a challenge in Global Trade Governance: Analysis and Recommendations*”, disimpulkan bahwa tujuan umum dari *Made in China 2025* dan kebijakan yang mendasarinya bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal, mengingat semakin maraknya dilema dalam perdagangan global yang dihadapi oleh para pemimpin China. Dilema tersebut mencakup masalah pembangunan internasional yang timbul dari meningkatnya konsentrasi industri global — didorong oleh pertumbuhan ekonomi tak berwujud — dan menyusutnya akses China untuk mengimpor dan mengembangkan komponen teknologi (seperti chip semikonduktor) yang semakin dicirikan sebagai “penggunaan ganda” oleh mitra dagang China. Ketegangan perdagangan yang ada saat ini antara China dan mitra dagangnya di negara berkembang juga telah mengungkap pola dalam tata kelola perdagangan global, yaitu menemukan keseimbangan antara memberikan ruang kebijakan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara berpendapatan menengah untuk mengejar pesaing mereka dari negara-negara maju dan industri, sambil mematuhi aturan rezim perdagangan global.

Dalam penelitian Napang dan Rohman (2022), dengan judul penelitian “*the trade war of China and the US in 2021, and it’s impact on the Indonesian economy*” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme merupakan bagian dari kekecewaan AS terhadap sistem perdagangan bebas karena tidak sesuai dengan keinginan AS. Tanpa disadari, kebijakan proteksionisme tersebut telah menjadi bumerang bagi perekonomian domestik AS, mengingat perdagangan bebas ditujukan untuk saling menguntungkan. Hal ini berdampak pada perekonomian China dan perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang. Oleh karena itu, proteksionisme tidak menguntungkan AS, mengingat AS tidak dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.

Adapun dalam penelitian Candra et al (2021) dengan judul penelitian “*Indonesian trade deficit with China: background and grey forecasting*” yang disimpulkan bahwa Defisit perdagangan terjadi ketika impor suatu negara melampaui ekspor. Defisit perdagangan yang kecil masih bisa diterima, tetapi defisit perdagangan yang besar bisa menjadi tanda kekhawatiran. Sejak 2008, Indonesia tidak pernah mengalami surplus perdagangan dengan China. Data perdagangan antara Indonesia dan China dalam sepuluh tahun terakhir memberi kita informasi tentang beberapa penyebab defisit perdagangan antara Indonesia dan China. Faktor-faktor tersebut, baik internal maupun eksternal, disorot dalam studi saat ini. Dengan menggunakan model peramalan abu-abu, studi tersebut

memperkirakan defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok akan mencapai -\$33,4 Miliar pada tahun 2025. Dibandingkan dengan tiga model peramalan statistik, model peramalan abu-abu menunjukkan kinerja yang lebih unggul.

Dalam penelitian Ma et al (2018), dengan judul penelitian *Strategic Plan of Made in China 2025 and Its Implementation* terdapat beberapa temuan yang didapatkan dalam penelitian tersebut. Ditemukan bahwa Industri manufaktur China mengalami tiga tahap perkembangan, yaitu kebangkitan, munculnya perusahaan manufaktur swasta dan asing, serta masuknya produk buatan China ke pasar internasional. Dalam perkembangan terkini, industri manufaktur China menghadapi peluang dan tantangan dalam pembangunannya dimana industri tersebut memiliki sistem industri terlengkap dan pasar konsumsi terbesar dengan potensi yang mendukung mereka. Disebabkan pasar domestiknya yang besar, kesenjangan pada daerah pedesaan dan provinsi pesisir timur memberikan China peluang pada beberapa sektor utama domestik untuk merestrukturisasi proses manufaktur dan sistem distribusi mereka. Di lain sisi, tingkat pertumbuhan per kapita China terbilang rendah; kemampuan inovasinya yang kurang; dan polusi lingkungan yang semakin memburuk, serta perlunya mengembangkan atau membangun keunggulan kompetitif melalui kemampuan inovasi.

Dalam pengembangan industri manufaktur China, sekelompok kecil perusahaan domestik terkemuka pun berupaya untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam berekspansi

secara internasional. Oleh karena itu, industri manufaktur China pun menyerukan strategi pengembangan baru “*Made in China 2025*”, strategi yang berupaya mengembangkan China dari raksasa manufaktur global menjadi negara adikuasa manufaktur global. Dalam mewujudkan tujuan strategis “*Made in China 2025*”. Bagi negara-negara kontinental dan negara-negara berkembang, pengalaman pengembangan dan implementasi strategi “*Made in China 2025*” menawarkan beberapa model yang dapat dijadikan rujukan. Namun, karena perbedaan karakteristik ekonomi sektor manufaktur China dengan negara lain, maka upaya replikasi pun dinilai sulit sehingga memungkinkan negara-negara lain untuk bekerja sama dalam menanggapi tuntutan manufaktur yang canggih.

B. Konsep Kebijakan Ekonomi Politik

Dalam konsep ini, peneliti mengklasifikasikan konsep kebijakan ekonomi politik kedalam dua sub pembahasan yaitu kebijakan, (seringkali diasosiasikan dengan kebijakan publik) dan analisis ekonomi politik.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang disulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agustino 2008; Aslinda 2023). Dalam konteks kebijakan publik, Coryanata (2011) menambahkan bahwa kebijakan publik sebagai sebuah hubungan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari hasil akhir kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun menurut

Januardi (2024), kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemangku kekuasaan kepada masyarakat luas atau publik untuk menyelesaikan hasil akhir dari apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut.

Menurut Wibawa, Purbokusumo & Pramusinto (1994), kebijakan publik memiliki tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Dimana ketiga komponen tersebut berkaitan dengan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Hal inilah yang juga seringkali diasosiasikan dengan implementasi.

Terdapat beberapa ahli yang memberikan pandangannya mengenai analisis ekonomi politik. Collinson mengemukakan bahwa analisis ekonomi politik merupakan pandangan untuk menganalisis hubungan antara politik dan proses ekonomi di suatu masyarakat, yang meliputi distribusi kekuasaan dan kekayaan di antara grup dan individu, serta setiap proses yang menciptakan, mendorong, dan mengubah hubungan tersebut (Collinson 2003). Adapun Whaites menjelaskan bahwa analisis ekonomi politik merupakan model analisis terhadap kebijakan di bidang ekonomi atau program pembangunan yang sangat teknis dan berbasis input yang dalam prosesnya cenderung kurang berjalan sesuai dengan program dan rencana kebijakan (Whaites 2017). Dari dua pemikiran diatas, dapat diamati bahwa analisis ekonomi politik dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang Collinson yang menekankan pada hubungan distribusi

kekuasaan dan kekayaan, dan setiap proses yang berkenaan dengan hubungan tersebut. Sedangkan Whaites menekankan pada proses keberhasilan di bidang ekonomi.

Pemaknaan pada analisis ekonomi politik juga dapat dipahami sebagai upaya dalam memahami dimensi politik dari konteks yang lebih kompleks dan menginformasikan kebijakan dan program yang terjadi kepada semua lapisan masyarakat (Australian Government 2016). Berikut adalah dimensi dari analisis ekonomi politik.

Tabel 2 1 Dimensi dalam Analisis Ekonomi Politik

Aktor	Institusi	Struktur
individu, organisasi atau koalisi dari sektor publik, swasta atau masyarakat sipil. Minat, motivasi, jaringan, dan pengaruh mereka berubah seiring waktu. Perilaku mereka dapat dianggap sebagai 'permainan dalam aturan'	'aturan main', hukum setempat, konvensi dan tradisi yang membentuk perilaku manusia. Institusi informal sama pentingnya dengan institusi formal. Mereka tidak statis dan sering menjadi fokus intervensi bantuan.	Konteks spesifik yang lebih bertahan lama yang berubah secara perlahan, seperti pengaruh global, modal sumber daya alam, pergeseran demografis, warisan sejarah, faktor sosial budaya, dan kemajuan teknologi.

Sumber (Wildan 2022)

Pada tabel diatas, aktor dipahami sebagai pemangku kepentingan yang relevan dengan masalah yang diangkat, baik individu maupun kelompok kepentingan. Dalam konteks ini, aktor akan bervariasi dalam menjalankan agensi yang diseimbangkan oleh hubungan kekuasaan yang dimainkan oleh peran ekonomi, sosial dan politik (Harris 2013)

Institusi, dipahami sebagai aturan main dalam masyarakat atau batasan yang dirancang sehingga membentuk interaksi manusia, yang mencakup aturan formal dan informal dan mengatur perilaku yang cenderung lebih rentan terhadap perubahan dalam jangka menengah daripada fitur struktural. Pada konteks ini, fitur struktural dipahami sebagai kondisi yang mempengaruhi negara dan sistem politik, termasuk karakteristik geografis, demografis, historis, ekonomi, dan sosial masyarakat yang bersangkutan. Begitupun dengan struktur, dipahami sebagai konteks spesifik yang lebih bertahan lama yang berubah secara perlahan, seperti pengaruh global, modal sumber daya alam, pergeseran demografis, warisan sejarah, faktor sosial budaya, dan kemajuan teknologi (Wildan 2022).

Selain itu, analisis ekonomi politik merupakan pilihan atas analisis kebijakan yang responsif secara politik, yang kemudian dapat difokuskan pada dua aspek, yaitu (Verena Fritz 2014)

1. Fokus pada reformasi kebijakan yang memberi nilai tambah dalam pembangunan sehingga dapat menikmati dukungan dari konstituen yang kuat secara politik.
2. Fokus pada tindakan yang dapat dilaksanakan secara langsung di dalam atau oleh pemerintah daripada mencari perubahan struktural yang besar.

Secara historis, perkembangan ekonomi politik telah terjadi sejak abad 18 yang dipelopori oleh munculnya pemikiran ekonomi Adam Smith dan David Ricardo yang dianggap sebagai penggagas landasan utama perkembangan ekonomi modern. Adam Smith yang dikenal melalui karyanya "*the wealth of*

nations” pada 1776 yang membahas mengenai keuntungan yang didapatkan dari aktivitas perdagangan, relasi antara produksi distribusi dan konsumsi, arti penting dari kebebasan pasar dan persaingan, serta pasar bebas yang dapat mencapai keseimbangan tanpa harus ada campur tangan/intervensi pemerintah. Adapun David Ricardo, yang turut memperluas pemikiran Smith dan menciptakan teori keunggulan komparatif yang juga membahas pentingnya keuntungan dari perdagangan internasional (Fai 2023).

Membahas mengenai definisi dari ekonomi politik. Ekonomi politik adalah sebuah studi yang merupakan penggabungan dari ilmu ekonomi dan politik. Kedua disiplin ilmu tersebut merupakan bagian dari ilmu sosial yang berbasiskan dua sub-disiplin ilmu yaitu ekonomi dan politik yang dikaitkan dengan bagaimana mengordinasi dan mengorganisasikan suatu kegiatan di masyarakat, pengelolaan konflik, pengalokasian keuntungan dan beban, serta penyediaan kebutuhan dan keinginan masyarakat (Nenden Herawaty Suleman 2021). Menurut Ruslin, konsep ekonomi politik mengarah kepada penggabungan semua kelas politik, baik dari segi proses, pengaruh maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah (Ruslin 2012). Adapun menurut Marx (1859), ekonomi politik adalah sebuah ilmu yang hadir seiring dengan perkembangan kepemilikan modal masyarakat yang semakin eksis dari sistem-sistem yang telah berlaku sebelumnya.

Istilah mengenai ekonomi politik pun dapat digunakan dalam dua konteks, yaitu (Mause 2019).

1. Pertama, istilah ekonomi politik digunakan untuk menunjukkan bidang penelitian multidisiplin di mana para peneliti menyelidiki hubungan antara bidang politik dan sistem ekonomi masyarakat yang berbeda di titik waktu yang berbeda.
2. Kedua, istilah ekonomi politik digunakan untuk merujuk pada interaksi politik dan bisnis yang dapat diamati dalam masyarakat.

Selain itu, terdapat dua istilah dan memiliki perbedaan diantara keduanya, yaitu ekonomi politik dan politik ekonomi. Ekonomi politik merupakan studi yang berbasis pada penerapan metode ekonomi terhadap politik. Adapun politik ekonomi merupakan studi yang berbasis pada penerapan metode politik terhadap masalah-masalah ekonomi. Berikut adalah tabel yang menguraikan hubungan dan perbedaan ekonomi dan politik.

Tabel 2 2 Hubungan dan Perbedaan Ekonomi dan Politik

Studi	Pengertian	
	Ekonomi	Politik
Ekonomi	Ekonomi Murni	Ekonomi Politik
	Teori ekonomi tradisional, perilaku maksimalisasi pasar, teori harga, efisiensi alokasi	Penerapan metode ekonomi terhadap politik, pilihan publik
Politik	Politik Ekonomi	Politik Murni
	Penerapan metode politik terhadap ekonomi, analisa distribusi kekuasaan dalam situasi pasar	Ilmu politik tradisional, analisis distribusi kekuasaan dalam bidang politik

Sumber (Wildan 2022)

Disini, ekonomi dan politik saling berinteraksi satu sama lain dengan metode dan analisisnya masing-masing beserta dengan interpretasinya, dalam kerangka alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan stabilitasi (Mufti 2018). Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa ekonomi politik memiliki perbedaan dengan ekonomi murni, khususnya dalam memandang bagaimana struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perspektif ekonomi politik, struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan dalam masyarakat adalah *given* Yustika dalam Dahlan & Wildan (Wildan 2022)

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa ekonomi politik adalah hasil interaksi antara kekuasaan yang berorientasi politik dengan kegiatan ekonomi pada masyarakat dan saling berkaitan satu sama lain, di mana struktur ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan politik begitupun sebaliknya.

Heriyono dalam Elyta (2018) mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam ekonomi politik, yaitu ekonomi perekonomian (*economy*) dan politik (*polity*).

Dalam konteks ekonomi, ekonomi tidak serta merta hanya dipandang dalam satu perspektif tertentu secara spesifik, melainkan juga dapat ditafsirkan secara luas. Ekonomi dipandang dalam keterkaitan antara perilaku yang memuat tindakan ekonomis oleh individu atau kelompok. Hal ini merujuk kepada bagaimana segala produk baik barang maupun jasa dapat tersalurkan dengan baik terhadap institusi yang berorientasi ke pasar, dan bisnis. Tujuan utama dalam

aspek ekonomi adalah mengumpulkan kekayaan. Artinya, ekonomi mengarah kepada segala sesuatu yang mengarah pada bisnis dan bagaimana mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Dalam hal ini terdapat apa yang disebut dengan kalkulasi ekonomi, yaitu suatu pendekatan pada bagaimana memanfaatkan apa yang tersedia (meskipun terbatas) untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa batas. Artinya, suatu pemikiran bagaimana cara agar manusia/masyarakat dapat memanfaatkan sesuatu yang kecil, namun dapat memaksimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari tindakan kecil tersebut (Elyta 2018).

Dalam konteks politik, politik dipandang sebagai (i) segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, (ii) mengandung kekuatan yang mengarah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam negara, (iii) perwujudan kegiatan yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, dan (iv) konflik pencarian dan pertahanan sumber-sumber penting tertentu (Elyta 2018).

Pada dasarnya, ekonomi politik membahas mengenai bagaimana mengatur dan menyediakan kebutuhan dasar kepada masyarakat. Terdapat pula prinsip yang dimiliki dari ekonomi politik yang pertama kali dicetuskan oleh John Stuart Mill dalam bukunya "*principles of political economy*" yang kemudian disempurnakan kembali oleh Samuel Hollander. Prinsip-prinsip tersebut meliputi

1. Tanah, tenaga kerja dan modal sebagai faktor produksi. Dalam perspektif ekonomi politik, faktor produksi adalah hal fundamental dalam ekonomi yang berpengaruh terhadap politik.
2. Pentingnya hal-hal yang berfungsi dalam menjalankan faktor produksi. Dalam hal ini, perlunya peningkatan pada faktor produksi seperti tanah, jumlah tenaga kerja maupun modal yang di mana hal ini dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas yang baik dan stabil
3. Pentingnya berbagai hukum yang berkaitan dengan peningkatan faktor produksi. Dalam hal ini, hukum yang berfungsi dalam meningkatkan faktor produksi bergantung pada tiga elemen yaitu buruh, modal dan tanah. Oleh karena itu, hukum penduduk dan kependudukan, hukum modal, hukum *supply and demand*, serta segala bentuk hukum yang berkaitan dengan faktor produksi.
4. Pentingnya menabung dengan tujuan produksi
5. Pentingnya memperhatikan segala aspek yang berada di luar produksi namun mempengaruhi keberlanjutan aktivitas produksi, seperti isu perdagangan internasional, permintaan domestik, masalah populasi dan sejenisnya (Elmon Tampubolon 2022).

Selain daripada itu, terdapat pula dua klasifikasi dari ekonomi politik, yaitu ekonomi politik klasik dan ekonomi politik modern (Elmon Tampubolon 2022).

1. Ekonomi politik klasik, seringkali dikaitkan dengan ekonomi klasik yang kemudian berkembang seiring dengan perkembangannya pada abad ke 18

hingga pertengahan abad 19. Pemikir pada periode ini adalah Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Richardo, Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill.

2. Ekonomi politik modern, merupakan studi ekonomi politik pasca ekonomi politik klasik dan neoklasik eksis, dan seringkali dikaitkan dengan Marxisme atau kapitalisme maupun liberalisme.

Frey dan Schneider menguraikan tiga model utama dalam ekonomi-politik.

1. Pertama, untuk mencapai spesifikasi yang lebih baik dari sektor pemerintah dalam model makroekonomi dengan melakukan endogenisasi.
2. Kedua, menghasilkan prakiraan keseluruhan yang lebih baik dengan mampu memprediksi reaksi kebijakan pemerintah.
3. Ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas saran kebijakan dari para ekonom melalui kesadaran akan kendala politik dalam sistem tertutup (Schneider 1981).

Dalam hal ini, Kebijakan Ekonomi politik adalah suatu kebijakan pemerintah dalam menentukan tindakan baik langsung ataupun tidak langsung berpengaruh kepada arah perdagangan negara. Kebijakan ekonomi Internasional meliputi upaya menjaga keseimbangan perdagangan internasional antar negara (Wahab 2013).

C. Konsep Kerjasama Bilateral

Kerjasama adalah suatu hubungan yang terjadi diantara dua negara yang bersangkutan. Secara umum, kerjasama dua negara atau kerjasama internasional didefinisikan sebagai bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara-negara secara global yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan dan ekonomi yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara (Ikbar dalam Bagaskara 2018). Dalam kerjasama internasional, terdapat dua faktor secara umum yang menjadi fokus perhatian, yaitu (Sugiono 2004):

1. Negara tidak lagi dianggap sebagai aktor eksklusif dalam perpolitikan internasional, melainkan hanya sebagai suatu bagian dari hasil interaksi global secara politik, militer, ekonomi dan kultural.
2. Kerjasama internasional tidak lagi ditentukan oleh kepentingan nasional negara, melainkan juga oleh institusi internasional yang mengelola berbagai kepentingan dari negara anggota/yang terlibat didalamnya.

Terjadinya kerjasama internasional disebabkan adanya tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian kepentingan bersama. Oleh karena itu kerjasama internasional adalah suatu keharusan sebab adanya hubungan interdependensi antar negara dan kompleksnya permasalahan dalam masyarakat internasional. Keohane dan Axelrod (1985) menyebutkan bahwa keberhasilan kerjasama tergantung pada adanya kesamaan kepentingan, jumlah aktor yang

terlibat, serta bayangan masa depan (*shadow of future*) yang mencakup empat faktor, yaitu jangka waktu harapan masa depan, keteraturan situasi, adanya informasi mengenai tindakan para aktor yang terlibat, serta umpan balik yang cepat dalam suatu kerjasama.

Kerjasama internasional terbagi kedalam tiga bentuk, yaitu (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2023)

1. Kerjasama bilateral, kerjasama yang dibuat dan dilakukan oleh dua negara untuk mengatur pencapaian kepentingan kedua negara.
2. Kerjasama regional, kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara dalam suatu kawasan.
3. Kerjasama multilateral, kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di luar kawasan tertentu.

Kerjasama bilateral adalah jenis kerjasama yang terjadi antara dua negara atau pihak yang melibatkan dua subjek hukum yang bekerjasama dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya atau militer (Pusdiklat Kementerian Luar Negeri 2022). Adapun menurut Candra (2022), kerjasama bilateral adalah suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang di manifestasikan ke dalam bentuk koperasi. Serta menurut Rudy (2002) bahwa kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi antar dua negara

Terdapat enam faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan kerjasama bilateral, yaitu (Candra 2022)

1. Ketidakmampuan suatu negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dalam negerinya yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam yang akhirnya menuntut negara untuk melakukan kerjasama atau meminta bantuan dan saling membantu dengan negara lain.
2. Ketidakmampuan suatu negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dalam negerinya karena yang disebabkan oleh keterbatasan teknologi, serta sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Ketidakmampuan suatu negara untuk menyelesaikan konflik dalam negerinya. Penyelesaian permasalahan domestik akan terjadi apabila negara melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain.
4. Keinginan suatu negara untuk menciptakan perdamaian dengan negara yang terlibat dalam hubungan bilateral dengan negara tersebut.
5. Keinginan suatu negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.
6. Keinginan suatu negara untuk mempercepat pembangunan yang ada di dalam negerinya.

Kerjasama bilateral memiliki beberapa tujuan yaitu untuk menjaga perdamaian dunia, saling memenuhi kebutuhan ekonomi, bekerjasama dalam mengurus imigrasi, mengatasi permasalahan global secara bersama-sama, serta untuk mencapai kemajuan dalam aspek kebudayaan. Kerjasama dalam bentuk bilateral biasanya digunakan untuk beberapa kepentingan suatu negara terhadap negara lain yang dianggap memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya dan

hanya melibatkan dua negara saja, sementara bentuk multilateral biasanya digunakan dalam sebuah institusi regional dan organisasi internasional dan tidak hanya melibatkan dua negara melainkan lebih dari dua negara (Haryanto 2015).

Adapun menurut Holsti (1964), terdapat empat pola dari kerjasama bilateral yang meliputi beberapa proses, yaitu

1. Respon atau kebijakan faktual dari negara yang menginspirasi
2. Persepsi dari respon negara yang menginisiasi terhadap negara penerima
3. Respon atau timbal balik dari negara penerima
4. Persepsi oleh pembuat keputusan dari negara inisiator

D. Konsep Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas (*free trade*) merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah transaksi yang dilakukan oleh satu negara ke negara lainnya. Istilah mengenai perdagangan bebas (*free trade*) diperkenalkan pertama kali oleh Adam Smith dan David Ricardo, yang dengan sangat jelas mengaitkannya dengan imobilitas modal dalam model mereka dan memandang pertukaran komoditas yang padat modal atau padat karya sebagai pengganti sempurna bagi mobilitas faktor (Siddiqui 2018). Perdagangan bebas mengacu pada perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bertujuan untuk menghilangkan tarif, kuota, dan hambatan lainnya untuk meningkatkan perdagangan dengan melonggarkan pembatasan kelembagaan dan ekonomi (Africa 2022).

Konsep perdagangan bebas (*free trade*) berakar pada gagasan bahwa negara yang menahan diri untuk tidak mengaplikasikan kebijakan yang mengutamakan industri dalam negeri dibandingkan pesaing asing, sebagaimana yang dianut oleh para pemikir klasik dan neo-klasik terkait dengan teori keunggulan komparatif (Nagel dan Burnete 2018). Dalam karya Adam Smith, *Wealth of Nations*, yang diterbitkan pada tahun 1776, Smith menekankan bahwa negara seharusnya terlibat dalam perdagangan bebas, daripada melakukan akumulasi surplus perdagangan dan emas. Di dalam proses tersebut, negara dapat melakukan pembagian kerja sehingga mereka dapat mengkhususkan dan memfokuskan upayanya dalam memproduksi berbagai barang yang memiliki keunggulan biaya yang absolut dan mengimpor berbagai barang yang akan lebih mahal untuk diproduksi di dalam negeri (Siddiqui 2024).

Gagasan mengenai perdagangan bebas mencakup mengenai konsep pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan melalui perjanjian antar negara atau kawasan. Gagasan tersebut berakar pada budaya politik modern awal, dengan asal-usul yang mendalam dalam protes pada abad keenam belas yang menentang perusahaan-perusahaan monopoli dan memanfaatkan hak milik dan konstitusi kuno untuk mengadvokasi pasar terbuka (Pennington 2024).